

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP
KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
SOPPENG (STUDI KASUS DI BPKPD SOPPENG)**

SKRIPSI



WAODE NUR KHALIFA MUQADDIMA

105731108021

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

MAKASSAR

2025

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP
KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
(STUDI KASUS DI BPKPD SOPPENG)**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh:

WAODE NUR KHALIFA MUQADDIMA

NIM: 105731108021

***Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Pada Program Studi Akuntansi Fakultas
Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar***

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2025

HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Allah tidak akan membebani mereka melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya”

(QS Al Baqarah : 286)

“Terlambat Bukan Berarti Gagal, Cepat Bukan Berarti Hebat. Terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah, setiap orang memiliki proses yang berbeda. *PERCAYA PROSES* itu yang paling penting, Karena Allah telah mempersiapkan Hal Baik dibalik Kata Proses yang kamu anggap Rumit”

(Edwar Satria)

“Setiap tetes keringat orang tua ku adalah ribuan langkahku untuk terus maju”

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini kupersembahkan kepada kedua orang tuaku, terima kasih Ya Allah memberikanku orang tua yang sangat hebat entah bagaimana aku bisa membalas kebaikannya , aku bersaksi bahwa orang tuaku telah menjaga sebaik-baiknya Amanah yang engkau titipkan ini dihidup mereka. Bahkan aku tidak tau bahwa mereka masih meneteskan air matanya di atas sajadah dan memohon kepada agar anaknya diberikan kesuksesan dalam hidupnya. Aku memohon agar engkau memberikan orang tuaku usia dan umur yang panjang, raga & doanya masih aku butuhkan untuk menemaniku”



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap
Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng
(Studi Kasus Di BPKPD Soppeng)
Nama Mahasiswa : Waode Nur Khalifa Muqaddima
No. Stambuk/ NIM : 105731108021
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan dihadapan panitia
penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 19 Agustus 2025 di Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 28 Shafar 1447 H
22 Agustus 2025 M

Pembimbing I

Dr. Ansyarif Khalid, SE., M.Si., Ak., CA
NIDN: 091609660

Pembimbing II

Dr. Mukminati Ridwan, SE., M.Si
NIDN: 0919017901

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dr. Edy Jusriadi, SE., M.M
NBM: 103 8166

Ketua Program Studi Akuntansi

Dr. Mira, SE., M.Ak.Ak
NBM: 1286 844



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama : Waode Nur Khalifa Muqaddima, Nim : 105731108021 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0012 /SK-Y/62201/091004/2025, Tanggal 25 Shafar 1447 H/ 19 Agustus 2025 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 28 Shafar 1447 H
22 Agustus 2025 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, ST., MT., IPU
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. Edi Jusriadi, SE., MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Amril, SE., M.Si., Ak., CA
2. Dr. Chairul Ihsan Burhanuddin, SE., M.Ak
3. Hasanuddin, SE., M.Si
4. Masrullah, SE., M.Ak

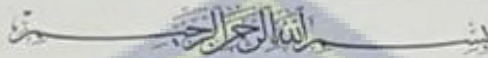
Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar


Dr. Edi Jusriadi, SE., MM
NBM: 1038 166



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar



SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Nama Mahasiswa : Waode Nur Khalifa Muqaddima
No. Stambuk/ NIM : 105731108021
Program Studi : Akuntansi
Judul Penelitian : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap
Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng
(Studi Kasus Di BPKPD Soppeng)

Dengan ini menyatakan bahwa:

**Skripsi Yang Saya Ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI Hasil Karya
Sendiri, Bukan Hasil Jiplakan dan Tidak Dibuat Oleh Siapa pun.**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia
menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 28 Shafar 1447 H
22 Agustus 2025 M



Membuat Pernyataan:

Waode Nur Khalifa Muqaddima
NIM: 105731108021

Diketahui Oleh:



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dr. Edi Jusriadi, SE., M.M
NBM: 1038166

Ketua Program Studi Akuntansi

Dr. Mira, SE., M.Ak., Ak
NBM: 1286 844

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Waode Nur Khalifa Muqaddima
NIM : 105731108021
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng (Studi Kasus Di BPKPD Soppeng)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Makassar, 28 Shafar 1447 H
22 Agustus 2025 M

Yang Membuat Pernyataan,



Waode Nur Khalifa Muqaddima

NIM: 105731108021

ABSTRAK

WAODE NUR KHALIFA MUQADDIMA, TAHUN 2025. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng (Studi Kasus Di BPKPD Soppeng)*. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing Oleh: Bapak Ansyarif Khalid dan Ibu Mukminati Ridwan.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Pekaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Soppeng, dengan fokus pada data keuangan dari tahun 2020-2024. PAD merupakan sumber pendapatan utama daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan sah lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan metode analisis regresi linier sederhana melalui bantuan perangkat lunak SPSS 26. Hasil pengujian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Namun demikian tingkat kemandirian Kabupaten Soppeng masih berada pada kategori sangat rendah (0-25%), dengan capaian tertinggi sebesar 18,5% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Soppeng masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, dan optimalisasi PAD perlu ditingkatkan untuk memperkuat kapasitas fiskal dan otonomi daerah.

Kata Kunci: *Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah, Dana Transfer, & Otonomi Daerah.*

ABSTRACT

WAODE NUR KHALIFA MUQADDIMA, TAHUN 2025. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng (Studi KASUS DI BPKPD Soppeng)*. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing Oleh: Bapak Ansyarif Khalid dan Ibu Mukminati Ridwan.

This study aims to analyze the effect of Local Own- Source Revenue (PAD) on regional financial independence in Soppeng Regency, based on financial data from 2020 to 2024. PAD is the main source of local revenue, comprising regional taxes, service charges, income from regionally managed assets, and other legitimate sources. The research applies an associative quantitative approach using simple linear regression analysis with the assistance of SPSS 26 software. The findings indicate that PAD has a significant positive effect on regional financial independence. However, the financial independence level of Soppeng Regency remains very low (0-25%), with the highest achievement of 18,5% in 2024. These result suggest that the region still heavily relies on intergovernmental transfers and needs to optimize its PAD to strengthen fiscal capacity and regional autonomy.

Keyword: *Local Own- Source Revenue, Regional Financial Independane, Transfer Funds, & Regional Autonom.*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasullulah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “ **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten Soppeng (Studi Kasus Di BPKPD Soppeng)**”

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis Bapak **Laode Sabaruddin** dan Ibu **Sunarmi** yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus. Dan saudara- saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, serta dukungan baik materi maupun moral, dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, S.T.,M.T., IPU Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. Edi Jusriadi, SE.,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Mira, SE.,M.Ak., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Masrullah, SE.,M.Ak., selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Bapak Dr. Ansyarif Khalid, SE.,M.Si.,Ak.,CA, selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi selesai dengan baik. Semoga bapak senantiasa diberikan Kesehatan dan kelancaran dalam berkarir, serta kesuksesan dalam setiap Langkah.
6. Ibu Dr. Mukminati Ridwan, SE.,M.Si selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama penyusunan skripsi hingga ujian skripsi. Semoga ibu senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam berkarir, serta kesuksesan dalam setiap langkah.
7. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

8. Segenap staff dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
9. Rekan- rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 21 yang selaku belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
10. Terima kasih kepada seluruh responden BPKPD Kabupaten Soppeng dalam partisipasinya sehingga tercapainya skripsi ini.
11. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Laode Sabaruddin dan pintu surgaku Ibunda Sunarmi. Terima kasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal Lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga ayah dan ibu sehat, panjang umur dan bahagia selalu.
12. Terima kasih kepada kakak saya Laode Muhammad Ikbal dan adik saya Waode Nurhalisa yang telah memberikan semangat, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.
13. Teruntuk untuk sahabat seperjuangan saya, yang selalu menemani, memberikan motivasi dan semangat yang luar biasa dari penulis awal perkuliahan hingga akhir saat ini. Terima kasih tidak meninggalkan penulis sendirian, selalu menjadi garda terdepan saat penulis membutuhkan bantuan serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama berada di perantauan ini.

14. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri. Waode Nur Khalifa Muqaddima.

Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau sering merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Khalifa. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang Budiman, penulis senantiasa mengharap saran dan kritiknya semi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah- mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Kampus Biru universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, Mei 2025

WAODE NUR KHALIFA MUQADDIMA

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
A. Tinjauan Teori.....	5
B. Penelitian Terdahulu.....	14
C. Kerangka Pikir	18
D. Hipotesis	19
BAB III METODE PENELITIAN.....	21
A. Jenis Penelitian	21

B. Lokasi dan Waktu Penelitian	21
C. Jenis dan Sumber Data.....	21
D. Populasi dan Sampel	22
E. Teknik Pengumpulan Data.....	22
F. Definisi Operasional Variabel	23
H. Uji Hipotesis	26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	28
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	28
B. Hasil Penelitian	37
C. Hasil Analisis Data.....	40
D. Pembahasan	52
BAB V KESIMPULAN	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	12
Tabel 2.2	14
Tabel 4.1	41
Tabel 4.2	42
Tabel 4.3	44
Tabel 4.4	45
Tabel 4.5	46
Tabel 4.6	47
Tabel 4.7	48
Tabel 4.8	51
Tabel 4.9	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	22
Gambar 4.1	45
Gambar 4.2	48



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya lokal guna memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan Masyarakat. Konteks ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi instrument kunci yang mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan anggaran secara mandiri.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber utama keuangan daerah yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhannya secara mandiri. PAD mencakup penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan lain-lain yang sah. Besarnya PAD menunjukkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan potensi ekonomi lokal sebagai sumber pendapatan. Daerah dengan PAD yang tinggi biasanya memiliki tingkat kemandirian keuangan yang lebih baik karena tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Alokasi khusus (DAK).

Salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang memiliki banyak potensi adalah Kabupaten Soppeng. Kabupaten ini dapat menghasilkan pendapatan daerah dari berbagai sektor, termasuk sektor pajak, retribusi, dan BUMD. Namun, hal ini

tidak berarti bahwa Kabupaten Soppeng dapat memenuhi semua kebutuhan daerahnya sendiri. Pemerintah menggunakan dana perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menutup ketidakseimbangan ini. Dana perimbangan yang mendukung kebutuhan daerah Kabupaten Soppeng ini terdiri dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Dalam konteks Kabupaten Soppeng, kemandirian keuangan daerah sangat bergantung pada efektivitas PAD dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Menurut penelitian yang dilakukan pada Dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Soppeng, faktor-faktor seperti kepemimpinan, komunikasi, dan profesionalisme memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai dalam mengelola keuangan daerah. Efektivitas pengelolaan PAD dapat berdampak pada peningkatan alokasi anggaran belanja modal serta penguatan struktur fiskal daerah.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa PAD berkontribusi signifikan terhadap kemandirian daerah. Misalnya studi di Jawa Barat menemukan bahwa PAD memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sementara dana perimbangan justru cenderung mengurangi tingkat kemandirian fiskal. Penelitian ini juga mengindikasikan bahwa daerah dengan PAD yang tinggi cenderung memiliki tingkat efektivitas dan kemandirian yang lebih baik. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun PAD penting, faktor lain seperti dana perimbangan dari pemerintah pusat masih memainkan peran dominan dalam struktur keuangan Kabupaten Soppeng. Oleh karena itu, untuk mencapai kemandirian keuangan yang lebih tinggi, pemerintah daerah perlu mengidentifikasi

dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan lain serta meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa Kabupaten Soppeng telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya selama beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa secara administrative, pengelolaan keuangan daerah sudah baik. Namun, untuk meningkatkan finansial, diperlukan upaya dalam meningkatkan PAD dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer. https://sulsel.bpk.go.id/kabupaten-soppeng/?utm_source=

Penelitian tentang pengaruh PAD terhadap kemandirian keuangan daerah penting untuk mengetahui sejauh mana PAD dapat menjadi instrument utama dalam meningkatkan otonomi fiskal daerah. Pemahaman ini dapat membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan strategis untuk mengoptimalkan sumber daya lokal, meningkatkan akuntabilitas, dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Penulis tertarik untuk membuat suatu karya ilmiah berupa proposal berdasarkan uraian tersebut, dan judulnya **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng (Studi Kasus Di BPKPD Soppeng)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah apakah PAD berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah bagaimana PAD berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan pada hari persiapan penelitian ini akan memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah informasi, referensi, dan pemikiran tentang dampak pendapatan asli daerah terhadap kemandirian daerah Kabupaten Soppeng.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai alat bantu pengajaran untuk memperluas pemahaman dan pengetahuan tentang dampak pendapatan asli daerah terhadap kemandirian daerah Kabupaten Soppeng.

b. Akademisi

Diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan memberikan informasi dan pemahaman sebagai panduan.

c. Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum tentang situasi seputar kemerdekaan Kabupaten Soppeng.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah (UU No. 28 Tahun 2009). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumbangan nyata yang diberikan oleh masyarakat setempat untuk mendukung otonomi yang diberikan kepada daerahnya. Perolehan PAD yang signifikan merupakan tanda dukungan yang diperlukan bagi pemerintah daerah untuk memiliki otonomi yang lebih besar dalam menjalankan operasional sehari-hari dan pembangunan daerah (Mulyana & Budianingsih, 2019). Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang paling dapat diandalkan di era otonomi daerah bagi setiap daerah. Tentu saja, sumber-sumber lain juga menjadi pertimbangan dalam melaksanakan pembangunan dan pemerintahan (Beno et al., 2022)

Tujuan Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD):

- Mengetahui kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah
- Mengukur tingkat kemandirian daerah
- Menilai efektivitas pengelolaan potensi ekonomi daerah

Sumber pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.28 tahun 2009 bersumber dari: Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain- lain PAD yang sah

a. Pajak Daerah

Pajak daerah yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Wibowo & Utami, 2014). Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan ini mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah lagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Asteria, 2015). Dengan kata lain pajak daerah yaitu: 1). Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah sendiri, 2). Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi pendapatan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah, 3). Pajak yang dipungut atau ditetapkan oleh pemerintah daerah, 4). Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat

tetapi pungutannya dibagi hasilkan dengan dibebani pungutan tambahan oleh pemerintah daerah.

Berikut ini jenis pajak daerah dan tarif maksimumnya, sesuai dengan undang-undang No. 28 Tahun 2009 (<http://djkd.kemendagri.go.id>):

1. Jenis pajak daerah tingkat provinsi terdiri atas:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor 10%, tarif progresif dapat digunakan untuk kendaraan pribadi
 - b) 20% adalah biaya transfer kendaraan bermotor
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 10%, tarif dapat diturunkan untuk mobil yang digunakan untuk angkutan umum
 - d) Pajak Pemanfaatan Air Permukaan 20%
 - e) Pajak Rokok 10% dari tarif cukai rokok
2. Jenis pajak daerah tingkat kabupaten/kota terdiri atas:
 - a) 10% untuk hotel, 10% untuk restoran, 35% untuk hiburan, dan 25% untuk reklame
 - b) 10% pajak penerangan jalan
 - c) 25% pajak mineral dan bantuan bukan logam
 - d) 30% pajak parkir
 - e) 10% pajak sarang burung walet
 - f) 0,3% pajak bumi dan bangunan di daerah pedesaan dan perkotaan

g) BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan)

h) 20% pajak pemanfaatan air tanah

b. Restribusi Daerah

Retribusi merupakan pembayaran kepada negara oleh pihak yang memanfaatkan jasa negara dalam hal ini retribusi daerah merupakan pembayaran kepada negara atas jasa yang diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung atau atas hasil pekerjaan yang diperoleh dari suatu usaha atau barang milik daerah (Kusumadewi,C.,& Purwanto, W., 2020). Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah adalah pungutan daerah yang pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan atau disediakan sebagai imbalan atas pemanfaatan yang diperoleh secara langsung oleh seseorang atau badan (Marlin & Pratiwi, 2021)

Pembayaran retribusi adalah: 1). Dasar untuk mengenakan retribusi biasanya harus didasarkan pada *total cost* dari pelayanan-pelayanan yang disediakan, 2). Dalam beberapa hal retribusi biasanya harus didasarkan pada kesinambungan harga jasa suatu pelayanan, yaitu dasar mencari keuntungan.

Sedangkan jenis-jenis retribusi sesuai dengan UU No. 28 tahun 2009 (<http://djkd.kemendagri.go.id>) adalah sebagai berikut:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- 10) Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus
- 11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- 12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- 13) Retribusi Pelayanan Pendidikan
- 14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
- 15) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- 16) Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan
- 17) Retribusi Tempat Pelelangan
- 18) Retribusi Terminal
- 19) Retribusi Tempat Khusus Parkir
- 20) Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa

- 21) Retribusi Rumah Potong Hewan
- 22) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
- 23) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- 24) Retribusi Penyeberangan di Air
- 25) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
- 26) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- 27) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- 28) Retribusi Izin Gangguan
- 29) Retribusi Izin Trayek
- 30) Retribusi Izin Usaha Perikanan

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Sepanjang tidak melanggar ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat beberapa pendekatan untuk mengkaji potensi sumber pendapatan daerah. Badan usaha daerah, yaitu unit produksi, merupakan salah satu sumber PAD yang cukup signifikan dan sangat penting yang perlu mendapat perhatian khusus: 1. Pelayanan; 2. Penyelenggaraan kesejahteraan umum; dan 3. Pengembangan pendapatan. Dengan mengutamakan industrialisasi, perdamaian, dan kepastian kerja, badan usaha daerah bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi terwujudnya pembangunan daerah khususnya serta mendorong terwujudnya tuntutan menuju Masyarakat yang adil dan makmur.

d. Lain- lain PAD yang sah

Lain-lain PAD yang sah meliputi (<http://raypratama.blogspot.com/2010/02/blog-post.html>.) :1). Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan, 2). Jasa giro, 3). Pendapatan bunga, 4). Keuntungan selisih nilai tukar rupiah mata uang asing, 5). Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

2. Kemandirian Keuangan Daerah

Kapasitas pemerintah kabupaten atau kota dalam mendanai berbagai inisiatif pemerintah, proyek pembangunan, dan layanan bagi masyarakat yang membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang dibutuhkan daerah ditunjukkan oleh kemandirian keuangan daerah (Bukit, 2022). Tingkat keterlibatan masyarakat setempat dalam pembangunan daerah juga tercermin dari ketergantungan daerah di sisi lain, semakin besar kemandirian keuangan daerah memberikan kesan semakin tingginya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Salah satu unsur PAD adalah pajak dan retribusi daerah. Perbandingan antara PAD dengan pendapatan pemerintah pusat menunjukkan adanya kemandirian keuangan daerah (Hidaya & Hasbiullah, 2023). Kemampuan suatu daerah untuk menggali potensi sumber daya guna mengurangi atau menghilangkan ketergantungan pada entitas yang berasal dari luar daerah disebut kemandirian keuangan daerah. Kemampuan pemerintah untuk menggunakan berbagai bentuk pendapatan daerah

guna mendanai pembangunan daerah dan operasional pemerintahan disebut kemandirian keuangan daerah (Malau & Simarmata, 2020)

Hubungan situasional dalam penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu kemampuan keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, harus diperhatikan dalam menentukan pola interaksi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:

Tabel 2.1

Pola hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah

Kemampuan keuangan	Kemandirian %	Pola Hubungan
Sangat Rendah	0-25%	Instruktif
Rendah	25-50%	Konsultatif
Sedang	50-75%	Partisipatif
Tinggi	75-100%	Delegatif

Sumber: Adhiatmoko dalam Indah S.N, 2020

- a) Pola hubungan instruktif menunjukkan bagaimana pemerintah pusat memberikan pedoman atau ketentuan yang harus dipatuhi oleh pemerintah daerah dalam mengelola sumber pendapatan daerah.
- b) Pola hubungan konsultatif mengindikasikan campur tangan dari pemerintah pusat mulai berkurang karena menganggap daerah sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah

- c) Pola hubungan partisipatif mengindikasikan terkait peranan pemerintah pusat mulai berkurang, karena mengingat daerah terkait tingkat kemandiriannya mendekati mampu dalam menjalankan otonomi daerah
- d) Pola hubungan delegatif mengindikasikan campur tangan pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam menjalankan segala bentuk urusan otonomi daerah.

Otonomi daerah cukup tinggi. Ketergantungan daerah terhadap pihak lain, dalam hal ini pemerintah pusat, berkurang apabila pendapatan daerah lebih besar. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah dapat juga digambarkan dengan tingkat kemandirian, tingkat kemandirian yang tinggi juga dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi, seperti yang terlihat dari tingginya partisipasi masyarakat dalam pajak dan retribusi. Akibatnya, sejumlah variabel mempengaruhi kemandirian daerah, termasuk:

- a. Potensi perekonomian daerah yang terkendali masih terbatas.
- b. Penerimaan pajak atau retribusi daerah masih rendah.
- c. Administrasi pemungutan masih rendah.
- d. Kemampuan perencanaan dan pengawasan masih kurang.
- e. Kemampuan untuk mendongkrak pendapatan daerah melalui dinas pendapatan daerah.

Kapasitas suatu daerah untuk memanfaatkan potensi sumber dayanya dengan mengurangi atau menghilangkan ketergantungannya pada entitas eksternal disebut sebagai kemandirian daerah. Daerah otonom

menunjukkan kemampuan pemerintah untuk mendanai pembentukan atau pengoprasian tata kelola dan pembangunan daerah dari sumber pendapatan asli daerah.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	(Fatimah et al., 2020)	Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal dan tingkat kemandirian keuangan.	X1: Pendapatan asli daerah X2: Dana perimbangan Y1: Belanja Modal. Y2: Kemandirian daerah.	<i>Structural Equation Modeling (SEM)</i>	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
2.	(Kristina et al., 2021)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera	X1: Pendapatan asli daerah X2: Dana perimbangan Y: Kemandirian keuangan	Analisis Regresi Berganda	Pendapatan asli daerah mampu memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Halmahera Tengah, sementara untuk

		Tengah			variabel Dana perimbangan tidak mampu memberikan pengaruh terhadap peningkatan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
3.	(Syafira Frijunita et al., 2024)	Pengaruh Pad, Tax Effort, Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah	X1: PAD X2: Tax Effort X3: Belanja Modal Y: Kemandirian keuangan pemerintah daerah	Analisis Regresi Linier Berganda	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sedangkan <i>tax effort</i> tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, dan belanja modal menunjukkan hasil berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
4.	(Komunitas et al., 2012)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan	X1: Pendapatan Asli daerah X2: Dana alokasi umum X3: Belanja modal Y: Kemandirian keuangan daerah	Analisis Statistik Deskriptif	1)Pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. 2)Dana alokasi umum memiliki

		Daerah Pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017			pengaruh yang signifikan negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.
5.	(Wasil et al., 2020)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo	X1: Pendapatan Asli Daerah X2: Dana Perimbangan Y: Kemandirian keuangan daerah	Analisis Regresi Linier Berganda	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan terhadap kemandirian keuangan daerah, dana perimbangan berpengaruh negatif dan terhadap kemandirian keuangan daerah, pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.
6.	(Bukit, 2022)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/ Kota Provinsi Jambi Tahun 2010-2019	X1: Pendapatan asli daerah X2: Dana alokasi umum Y1: Kemandirian daerah Y2: Pertumbuhan Ekonomi	Analisis jalur	Hasil penelitian menunjukkan Pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif terhadap kemandirian daerah

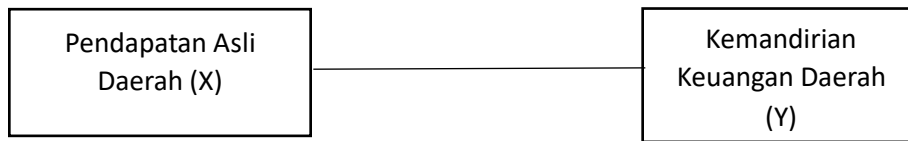
					Kabupaten/ Kota Provinsi Jambi tahun 2010- 2019.
7.	(Novianti & Ishak, 2022)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bandung	X: Pendapatan asli daerah Y: Kemandirian keuangan daerah	Analisis statistik deskriptif serta Analisis regresi linier berganda	Secara parsial pajak daerah memberikan pengaruh signifikan dengan arah yang positif terhadap kemandirian keuangan pemerintah Kota Bandung Tahun 2016-2020
8.	(Andriani & Wahid, 2019)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2006-20015)	X1: Pendapatan asli daerah X2: Dana perimbangan Y: Kemandirian keuangan daerah	Analisis regresi berganda	-Pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan kemandirian keuangan daerah pada pemerintah Kota Tasikmalaya mengalami fluktuasi -pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah -dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah -pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap

					kemandirian keuangan daerah
9.	(Saleh, 2020)	Pengaruh Pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah	X1: Pendapatan asli daerah X2: Dana perimbangan Y: Kemandirian keuangan pemerintah daerah.	Regresi linier berganda	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan pemerintah Kabupaten Bogor 2012-2017.
10.	(Malau & Simarmata, 2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah.	X1: Pendapatan Asli Daerah X2: Belanja Modal Y: Kemandirian Keuangan daerah	Analisis data regresi panel	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, sebaliknya belanja modal berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.

C. Kerangka Pikir

Pendapatan asli daerah dari ekonomi asli daerah, yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan pendapatan daerah lain yang sah, menjadi landasan konseptual untuk penelitian ini. Penelitian ini menggunakan kerangka konseptual berikut untuk mengkaji bagaimana pendapatan asli daerah memengaruhi kemandirian keuangan daerah.

Gambar 2.1



Penulis menarik kesimpulan bahwa kemandirian daerah dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah berdasarkan data sebelumnya.

D. Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Tuntutan daerah seperti pertumbuhan, pembangunan, dan kepentingan umum lainnya dipenuhi oleh pendapatan asli daerah, yang berasal dari dalam daerah. Daerah berusaha sebisa mungkin mengurangi ketergantungan pada pemerintah federal atau provinsi. Besarnya pendapatan PAD daerah menunjukkan derajat kemandirian daerah PAD digunakan untuk menyediakan aliran pendapatan yang berfungsi sebagai standar untuk mengevaluasi seberapa baik pemerintah daerah mengelola keuangannya dan mengembangkan ekonominya (Syafira Frijunita et al., 2024)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan untuk Belanja Modal. PAD di dapatkan dari iuran langsung dari masyarakat, seperti pajak, retribusi dan lain sebagainya. Tanggung jawab pemerintah daerah kepada masyarakat adalah memberikan layanan publik

(public service) yang baik kepada masyarakat melalui Belanja Modal. Peningkatan PAD diharapkan akan mampu memberi efek yang signifikan terhadap Belanja Modal. Tingkat kemandirian keuangan daerah ditunjukkan dengan kontribusi PAD untuk membiayai belanja-belanja daerahnya termasuk belanja modal seperti pembangunan dan perbaikan diberbagai sektor. Semakin tinggi tingkat investasi modal yang dialokasikan dari PAD diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan pendapatan asli daerah sehingga peningkatan tersebut dapat mendorong terwujudnya kemandirian keuangan di daerah tersebut (Fatimah et al., 2020)

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Pantun Bukit (2022), Syafira Frijunita et al (2024), dan Fatimah et al (2020) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Dari uraian tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini adalah

H: Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten Soppeng?



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metodologi yang digunakan adalah kajian asosiatif kuantitatif. Tujuan dari teknik pendekatan asosiatif kuantitatif adalah untuk menguji pengaruh atau hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten Soppeng.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) yang terletak di Jl. Salotungo No. 3, Watansoppeng, Sulawesi Selatan, menjadi Lokasi penelitian ini. Pada tahun 2025, sesi penelitian berlangsung selama dua bulan.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Data sekunder digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dari sumber lain atau diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya dan disusun dalam arsip publik sebagai bukti catatan Sejarah.

2. Sumber data

Teknik laporan keuangan yang diselidiki yaitu, membuat atau mengumpulkan catatan laporan keuangan digunakan untuk memperoleh sumber data untuk penyelidikan ini.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan kategori generalisasi yang terdiri dari item dan orang dengan atribut tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian diambil kesimpulan. Data pendapatan daerah Kabupaten Soppeng yang merupakan data laporan keuangan (LRA) yang digunakan selama lima tahun terakhir (2020-2024) yang di breakdown per bulan menjadi 12 bulan per tahun menjadi populasi penelitian ini dengan pengelolaan 60 sampel. Rentang ini dipilih untuk memberikan analisis tren yang relevan dan bermakna mengenai situasi keuangan daerah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu pengumpulan informasi secara tidak langsung atau melalui buku-buku, arsip, dokumentasi, atau media daring.

F. Definisi Operasional Variabel

1. Variabel bebas, juga dikenal sebagai variabel bebas, adalah variabel yang mempengaruhi atau mengubah variabel terikat, juga dikenal sebagai variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah:

X= Pendapatan Asli Daerah

2. Variabel dependen, juga dikenal sebagai variabel terikat, adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independent. karena dipengaruhi oleh variabel oleh variabel independent (variabel bebas), maka variabel ini disebut sebagai variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah:

Y= Kemandirian Keuangan Daerah

G. Metode Analisis Data

Mencari pengukuran sejauh mana PAD berkontribusi terhadap total pendapatan daerah, menggunakan rumus yang ada di bawah ini:

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

= Pajak Daerah + Retribusi Daerah

+ Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

+ Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Mencari kemandirian keuangan daerah menggunakan rumus yang ada di bawah ini :

$$\text{Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer pusat/provinsi}} \times 100\%$$

Metode analisis data yang digunakan adalah model analisis statistik dengan menggunakan SPSS 25. Maka terlebih dahulu melakukan

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau sebaliknya. Model analisis yang dipergunakan dalam menjalankan pengujian yaitu One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Model regresi disebut mempunyai residual berdistribusi normal jika Asymp. Signifikan Sig (2-tailed) sebesar 0.05.

b. Uji Autokorelasi

Asumsi autokorelasi diuji menggunakan uji DW (Durbin Watson). Nilai DW sebagai patokan dalam menilai terlepas dari apakah ada autokorelasi. Secara garis besar pengukuran nilai DW dalam melakukan pengecekan autokorelasi yaitu: a. Nilai DW lebih kecil dari 2 berarti ada hubungan positif. b. Nilai DW disekitar 2 sampai +2 menampilkan tidak adanya autokorelasi. c. Nilai DW lebih besar +2 menampilkan adanya autokorelasi autokorelasi negative. Uji Autokorelasi juga dapat dilakukan melalui Run Test. Uji ini merupakan bagian dari statistik non-parametric yang dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat nilai Asymp. Sig

(2-tailed) uji Run Test. Apabila nilai Asymp.Sig (2-tailed) lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi. Uji run test akan memberikan kesimpulan yang lebih pasti jika terjadi masalah pada Durbin Watson Test yaitu nilai d terletak antara dL dan dU atau diantara $(4-dU)$ dan $(4-dL)$ yang akan menyebabkan tidak menghasilkan Kesimpulan yang pasti atau pengujian tidak meyakinkan jika menggunakan DW test (Ghozali, 2006:103).

- c. Uji Multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui bahwa telah ditemukan linear disekitar variabel independent. Sama halnya dengan yang dijelaskan (Aeniyatul, 2019), jika setiap variabel memiliki hubungan yang sempurna maka model kuadrat terkecil tidak berguna. Metode yang digunakan dalam pengecekan terkait dengan multikolinearitas ialah dengan memakai nilai Value Inflation Faktor (VIF). Dimana: a. Toleransi value < 0.01 atau $VIF > 10 \rightarrow$ terjadi multikolinearitas b. Toleransi value $> 0,01$ atau $VIF < 10 \rightarrow$ tidak terjadi multikolinearitas.

- d. Uji Heteroskedastisitas Asumsi pokok dari model regresi linier klasik ialah hambatan didalam regresi adalah heteroskedastisitas.

(Aeniyatul, 2019) mengemukakan bahwa uji heteroskedastisitas dilakukan dalam mengukur apakah dalam model regresi terdapat varians yang berbeda dari residual satu observasi ke observasi lainnya. Uji heteroskedastisitas digunakan dengan menguji Park. Bila

nilai hitung $<$ tabel maka dari itu akan timbul homoskedastisitas yaitu versi variabel independennya yaitu konstan untuk setiap nilai tertentu variabel independent. sebaliknya apabila nilai hitung $>$ tabel, berarti terjadi heteroskedastisitas.

H. Uji Hipotesis

Pengujian penelitian ini menggunakan analisis sederhana karena terdiri dari satu variabel independent dan satu variabel dependen. Analisis regresi sederhana bertujuan untuk mengukur hubungan variabel independent dan variabel dependen. Uji koefisien determinasi (R^2).

Uji R^2 atau disebut juga koefisien determinasi adalah nilai yang menggambarkan berapa kemampuan atau derajat distribusi variabel bebas dalam menerangkan atau menjelaskan variabel yang terikat dalam kemampuan yang terhubung atau mengukur kedekatan hubungan antara faktor bebas dan variabel dependen. Besarnya nilai R^2 diantara nol dan satu ($0 < R^2 < 1$). Model sudah baik dan tingkat keeratan antara variabel bebas dengan variabel terikat semakin dekat jika nilainya semakin mendekati satu. Pemilihan variabel X atas Y benar jika koefisien determinasinya lebih besar dari 0,5. Pemilihan variabel X untuk Y tidak tepat jika koefisien determinasinya kurang dari 0,5 (Aeniyatul, 2019).

1. Analisis Regresi linear sederhana

Analisis regresi linear sederhana bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara linear antara variabel pengetahuan dengan variabel minat. Berikut persamaan analisis linear sederhana sebagai berikut;

$$Y = a + bX$$

Keterangan;

Y= variable dependent

a= konstanta perubahan variable X terhadap Y

b= koefisien konstanta

X= variable independent

2. Uji Signifikasi Parsial (Uji- t)

Uji statistic t pada dasarnya menunjukkan seberapa besar kontribusi variabel independen terhadap penjelasan variabel dependen.

Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,5 ($\alpha=5\%$). Untuk pengambilan keputusan terikat hipotesisi dapat diterima atau ditolak sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikan $>0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi yang tidak signifikan). Artinya variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen
- b. Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Artinya secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Aeniyatul, 2019)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak dan Kondisi Geografis Kabupaten Soppeng

Kabupaten Soppeng adalah salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan dan memiliki luas 1.500 km², secara geografis Kabupaten Soppeng terletak pada 4°06'-4°32' LS dan antara 119°42' 18"-120°06' BT dengan Batas wilayah: sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone dan Kabupaten Wajo, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bone dan sebelah Barat berbatasan dengan kabupaten Barru.

Kabupaten Soppeng terletak pada depresi Sungai Walanae yang terdiri dari dataran dan perbukitan dengan luas daratan ±700 km² serta berada pada ketinggian rata-rata antara 100-200 m di atas permukaan laut. Ibu Kota Kabupaten Soppeng adalah Watansoppeng yang berada pada ketinggian 120 m di atas permukaan laut. Kabupaten Soppeng tidak memiliki wilayah pantai, gunung yang ada di wilayah kabupaten soppeng menurut ketinggiannya adalah sebagai berikut:

- a. Gunung Nene Conang (1464 m)
- b. Gunung Laposo (1000 m)
- c. Gunung Sewo (860 m)
- d. Gunung Lapancu (850 m)

- e. Gunung Bulu Dua (800 m)
- f. Gunung Paowengeng (760 m)

Kabupaten Soppeng memiliki tempat-tempat wisata berupa permandian air panas bumi yang bernama “Lejja”, permandian mata air “Ompo” dan permandian alam “Citta”.

2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng berkedudukan di jalan salotungo. Pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng dimulai pada tahun 2021. Legalitas pembentukan dan operasional SKPD ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng nomor 65 tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Kabupaten Soppeng Nomor 24 Tahun 2014 tentang uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

a. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng

1. Visi

Terwujudnya pengelola keuangan yang efisien, efektif akuntabel dan transparan menuju pelayanan keuangan yang prima dan profesional.

2. Misi

- A. Mewujudkan peningkatan pengelola keuangan dan pendapatan daerah dengan efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- B. Mewujudkan peningkatan pelayanan dan pendapatan daerah melalui pajak daerah.
- C. Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang representatif sesuai standar, tertib, optimal dan akuntabel.

b. Tugas pokok badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah

1. Kepala Badan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengoordinasikan, dan melaksanakan program dan kegiatan

urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Sub Bagian Umum

Sub bagian umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam memimpin, menyiapkan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi urusan ketatausahaan Bidang dan pengelolaan urusan umum kepegawaian yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Sub bagian perencanaan dan pelaporan

Sub bagian perencanaan dan pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub bagian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam memimpin, menyiapkan bahan, menghimpun, mengelola dan melakukan administrasi urusan perencanaan dan pelaporan serta melakukan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan pelaporan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Sub bagian keuangan

Sub bagian keuangan dipimpin oleh Kepala Sub bagian mempunyai tugas membantu sekretaris dalam memimpin, menyiapkan bahan, menghimpun, mengolah dan melakukan administrasi keuangan atau penatausahaan keuangan meliputi penyusunan anggaran, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bidang Anggaran

Bidang anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terkait dengan Bidang Anggaran yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a. Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Operasi.

Sub bidang perencanaan dan penyusunan anggaran belanja operasi dan tidak terduga dipimpin oleh Kepala sub bidang, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Anggaran dalam memimpin, menyiapkan bahan, penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan

melaksanakan program dan kegiatan Sub bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Operasi dan Tidak Terduga yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

b. Sub bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Modal.

Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Modal dipimpin oleh Kepala Sub bidang, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Anggaran dalam memimpin, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Sub bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Modal yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

4. Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas

Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terkait dengan Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

a. Sub Bidang Perbendaharaan

Sub bidang Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Subbidang, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dan pengelolaan Kas dalam memimpin, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan sub bidang perbendaharaan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

b. Sub Bidang Pengelolaan Kas

Sub bidang Pengelolaan Kas dipimpin oleh Kepala Sub bidang, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang perbendaharaan dan pengelolaan kas dalam memimpin, menyiapkan bahan, penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan sub bidang pengelolaan kas yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

5. Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi dipimpin oleh Kepala Bidang membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terkait dengan Bidang

Akuntansi yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

a. Sub Bidang Akuntansi

Sub bidang akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas dipimpin oleh Kepala Subbidang, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Akuntansi dalam memimpin, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan sub bidang akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

b. Sub Bidang Penyusunan Laporan Keuangan

Sub bidang penyusunan laporan keuangan dipimpin oleh Kepala subbidang, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Akuntansi dalam memimpin, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Penyusunan Laporan Keuangan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

6. Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang, membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terkait dengan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Sub Bidang Analisis Kebutuhan

Sub bidang Analisis Kebutuhan dipimpin oleh Kepala Subbidang, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengelolaaan Barang Milik Daerah dalam memimpin, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan sub bidang analisis kebutuhan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik

Sub bidang Pemanfaatan dan penghapusan Barang Milik Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam memimpin, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan sub bidang pemanfaatan dan penghapusan barang milik daerah yang

menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

B. Hasil Penelitian

Data yang digunakan adalah data skunder Laporan Realisasi Anggaran (ILRA) yang diperoleh dari Web <https://djk.kemenkeu.go.id/> Kabupaten Soppeng tahun 2021-2024.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dari ekonomi asli daerah yang berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan dan Lain- lain PAD yang sah.

Tabel 4.1

Jumlah PAD Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah PAD
2020	Rp. 151,455,225,345,90
2021	Rp. 155,455,225,345,90
2022	Rp. 142,984,979,837.03
2023	Rp. 166,337,709,659.39
2024	Rp. 1,189,407,743,925.80

Sumber: <https://djk.kemenkeu.go.id/>

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa Kabupaten Soppeng berhasil mempertahankan efektifitas penerimaan PAD tahun 2020 - 2024. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Soppeng mampu memaksimalkan potensi pendapatan daerah dengan meningkatkan penerimaan PAD dari berbagai sumber.

Komponen PAD bersumber dari UU No. 28 Tahun 2009 di atas digunakan untuk:

- a. Mengukur kontribusinya terhadap total pendapatan daerah
- b. Menentukan pengaruh PAD terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah
- c. Melihat efektivitas pemungutan PAD dari tahun ke tahun

2. Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan kepada masyarakat yang telah membayar pajak, retribusi daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang dibutuhkan. Besar kemandirian keuangan dalam penelitian ini dapat diukur dengan menggunakan rumus:

Tabel 4.2

Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2024

Tahun	PAD	Transfer Pusat	Presentase
-------	-----	----------------	------------

2020	Rp. 151,860,141,337,87	Rp. 854,758,766,531,00	17,8%
2021	Rp. 155,455,225,345,90	Rp. 970,643,355,351,00	16,0%
2022	Rp. 142,984,979,837,03	Rp. 931,660,464,598,00	15,3%
2023	Rp. 166,337,709,659,39	Rp. 924,615,682,393,00	18,0%
2024	Rp. 178,158,515,015,80	Rp. 962,398,539,540,00	18,5%

Sumber: <https://djpk.kemenkeu.go.id/>

Pada tabel di atas bahwa tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Soppeng pada tahun 2020-2024 masih terbilang sangat rendah karena berada dikisaran 0-25%. Pada tahun 2020-2023 tingkat kemandirian Kabupaten Soppeng tiap tahun mengalami naik turun, dapat kita lihat mengalami kenaikan yang mencapai tingkat kemandirian tertinggi yaitu 18,5% di tahun 2024. Tingkat kemandirian terendah pada tahun 2022 dengan tingkat kemandirian hanya mencapai 15,3%.

Komponen data kemandirian keuangan:

1. Perbandingan PAD terhadap dana transfer dari pusat

Diukur menggunakan rasio:

$$\text{Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer pusat/provinsi}} \times 100\%$$

2. Kategori kemandirian keuangan menurut persentase:

- a. 0 – 25%: Sangat Rendah (Instruktif)
- b. 25 – 50%: Rendah (Konsultatif)
- c. 50 – 75%: Sedang (Partisipatif)
- d. 75 – 100%: Tinggi (Delegatif)

C. Hasil Analisis Data

Variabel X dan Variabel Y

[illegible]

Deskriptif Variabel

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah	60	11915.00	14847.00	13246.6000	1023.15039
Kemandirian Keuangan Daerah	60	5.47	6.73	6.1080	.42801
Valid N (listwise)	60				

Tabel menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai minimum sebesar Rp 11.915,00 dan nilai maksimum sebesar Rp 14. 847,00. Nilai rata- rata PAD sebesar Rp 13.246,60 dengan standar deviasi sebesar Rp 1.023,15. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum PAD pada daerah yang menjadi kisaran nilai yang tinggi dengan penyebaran data yang masih dalam batas wajar.

Sementara itu, untuk variabel Kemandirian Keuangan Daerah, diperoleh nilai minimum sebesar 5,47 dan nilai maksimum sebesar 6,73. Rata- rata tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 6,1080, dengan standar deviasi sebesar 0,42801. Nilai standar deviasi yang relatif kecil menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah antar daerah sampel tidak terlalu bervariasi dan cenderung stabil.

1. Hasil Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten soppeng maka digunakan uji asumsi klasik seperti;

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah nilai sisa berdistribusi normal. Uji statistik yang digunakan untuk menguji apakah residual

berdistribusi normal adalah uji statistik *nonparametrik Kolmogorov-Smirno* (K-S). Cara menentukannya adalah dengan melihat nilai signifikansi sisa. Jika signifikansi lebih besar dari 0,05 maka residu berdistribusi normal (Imam Ghazali, 2011).

Tabel 4.3

Hasil Uji Normalitas dengan One-Sample Kolmogorov-Smirnov

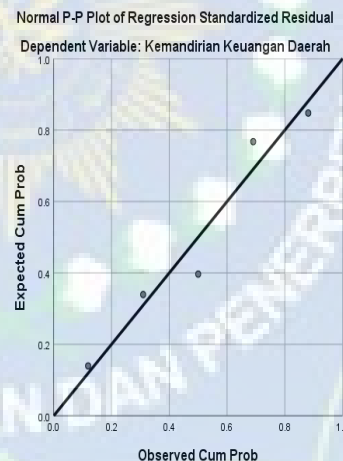
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.00000
	Std. Deviation	.14981
Most Extreme Differences	Absolute	.219
	Positive	.219
	Negative	-.201
Test Statistic		.219
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

- | |
|--|
| c. Lilliefors Significance Correction. |
| d. This is a lower bound of the true significance. |

Sumber: Diolah menggunakan SPSS

Dari Tabel 4.3 terlihat bahwa data yang diperoleh merupakan nilai Asymp Sig. (2-tailed) adalah $0,200 > 0,05$ sehingga residu berdistribusi normal. Uji normalitas juga dapat dilakukan dengan menggunakan analisis grafis berupa grafik P-P plot. Regresi dengan mencari sebaran data pada sumber diagonal grafik P-P standar. Adapun grafik P-P Plot dapat dilihat pada gambar 4.1.

Gambar 4.1



Grafik Normal P-P Plot

Gambar 4.1 merupakan grafik P-P Plot. Grafik P-P Plot diatas menunjukkan bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan

mengikuti arah garis diagonal tersebut. Dengan demikian, bahwa model regresi berdistribusi normal atau memenuhi syarat asumsi normalitas.

b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan (korelasi) antara nilai residual (galat) pada suatu observasi dengan residual pada observasi lainnya dalam suatu model regresi. Autokorelasi yang terjadi dapat menyebabkan pelanggaran terhadap asumsi klasik regresi linear, yang mengharuskan residual bersifat independen. Salah satu cara untuk menguji autokorelasi adalah dengan menggunakan **Durbin- Watson Test**.

Tabel 4.4

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.987 ^a	.974	.974	.06927	1.169
a. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah					
b. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan Daerah					

Sumber: Diolah menggunakan SPSS

Pada tabel diperoleh nilai Durbin- Watson sebesar 1.169 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala autokorelasi dengan dasar pengambilan keputusan $du (1.6927) < DW (1.169) > 4-du (2,6803)$.

c. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan pengujian yang mengetahui ada tidaknya korelasi antar variabel independen dalam suatu model regresi. Hasil penelitian menggunakan nilai toleransi dan VIF untuk menentukan apakah ada multikolinearitas. Menurut (Imam Ghozali, 2011), tidak terjadi gejala multikolonearitas, jika nilai tolerance $>0,10$ dan $VIF <10,00$.

Tabel 4.5

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a						
Model		Correlations			Collinearity Statistics	
		Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	Pendapatan Asli Daerah	.987	.987	.987	1.000	1.000
a. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan Daerah						

Sumber: Diolah menggunakan SPSS

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas diatas semua variabel memperoleh nilai tolerance sebesar 1,000 dan nilai VIF sebesar 1,000. Jika nilai tolerance $> 0,1$ dan VIF < 10 maka tidak terjadi Multikolinearitas. Sehingga dapat disimpulkan pada data penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dimaksudkan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varians antara residu suatu pengamatan dengan residu pengamatan yang lain dalam suatu model regresi. Para peneliti dalam penelitian ini menggunakan representasi grafis antara nilai prediksi (ZPRED) dan sisa (SPRED) dari variabel dependen. Menurut (Imam Ghazali, 2011), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual pengamatan satu ke pengamatan yang lain yang berbeda. Jika varians dari residual antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lain berbeda disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4.6

Hasil Uji Heteroskedastisitas

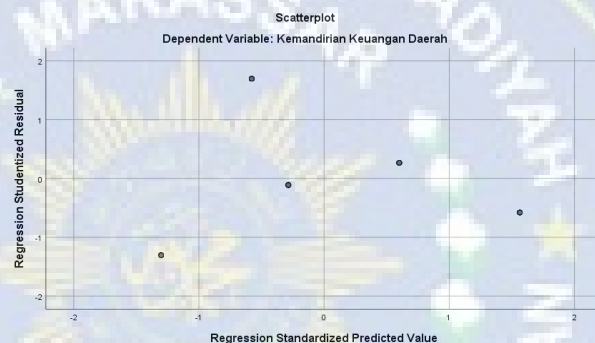
Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

1	(Constant)	1.400	1.268		1.104	.350
	Pendapatan Asli Daerah	-6.296	.000	-.415	-.791	.487
a. Dependent Variable: ABS_RES						

Dari hasil tabel diatas terlihat bahwa hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai signifikan variabel X mencapai nilai signifikansi $> 0,05$ sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada data penelitian ini.

Gambar 4.2

Hasil Uji Scatterplot



Pada Gambar 4.2 Berdasarkan hasil *scatterplot* diatas maka dapat diketahui bahwa titik-titik data tersebar disekitar angka 0 atau tidak hanya berkumpul di atas maupun di bawah angka 0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi gejala heterokedastsitas.

e. Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara linear antara variabel pengetahuan dengan variabel minat. Berikut persamaan analisis linear sederhana sebagai berikut;

$$Y = a + bX$$

Keterangan;

Y= variable dependent

a= konstanta perubahan variable X terhadap Y

b= koefisien konstanta

X= variable independen

Tabel 4.7
Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	.638	.117		.000
	Pendapatan Asli Daerah	.000	.000	.987	.000
a. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan Daerah					

Sumber: Diolah menggunakan SPSS

Berdasarkan table 4.6 diperoleh persamaan analisis regresi linear sederhana yaitu:

$$Y = 0,638 + 0,000X$$

Berikut penjelasan dari persamaan analisis regresi linear sederhana di atas sebagaiberikut:

- a. Nilai konstanta dari persamaan di atas sebesar 0,638 artinya dengan tanpa adanya pengaruh variabel bebas besarnya variabel minat adalah 0,638.
- b. Variabel pendapatan asli daerah memiliki nilai koefisien sebesar 0,000 yang berarti variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini menggambarkan bahwa setiap peningkatan pendapatan asli daerah maka kemandirian keuangan daerah akan meningkat dengan asumsi variabel lain tetap.

2. Uji Hipotesis

Beberapa uji hipotesis dilakukan dengan beberapa cara yakni:

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian ini bertujuan untuk mengukur besarnya persentase varian yang pengaruhnya ditunjukkan oleh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi dapat sebagai acuan pengukuran besarnya persentase kebenaran dari uji regresi. Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol (0) dan satu (1). Jika nilai koefisien determinasi regresi mendekati satu, maka semakin baik regresi tersebut, sedangkan apabila mendekati nol maka variabel independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel dependen.

Tabel 4.8

Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.987 ^a	.974	.974	.06927
a. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah				
b. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan Daerah				

Sumber: Diolah menggunakan SPSS

Berdasarkan hasil pengolahan data dapat dijelaskan bahwa nilai koefisien determinasi R² sebesar 0,974 atau 97,4%. Hal ini berarti menunjukkan bahwa variabel independent dalam penelitian ini yaitu pendapatan asli daerah dapat menjelaskan variabel dependen yaitu tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 97,4%. Sehingga sisanya sebesar 2,6% yaitu variabel lainnya yang tidak ada dalam penelitian ini.

b. Uji Parsial (T)

Uji t menunjukkan pengaruh yang signifikan antara variabel independent dan variabel dependen. Jika nilai signifikan $\leq 0,05$ maka terdapat pengaruh parsial atau jika nilai t-hitung $\geq$ t-tabel maka terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Hasil uji t dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.9

Hasil Parsial (T)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.638	.117		5.452	.000
	Pendapatan Asli Daerah	.000	.000	.987	46.843	.000
a. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan Daerah						

Berdasarkan pada Tabel 4.8 diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, pada pengujian hipotesis antara variabel (X) Pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah mempunyai nilai yang signifikansi sebesar 0,000. Jadi karena nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hasil t hitung = 46,843 dan t tabel 2,000, jadi dapat dilihat bahwa t hitung $>$ t tabel. Hasil uji t menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya variabel X (pendapatan asli daerah) berpengaruh secara parsial terhadap kemandirian keuangan daerah disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Hal ini ditunjukkan dengan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

D. Pembahasan

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka analisis data yang telah dilakukan dan hasil pembahasan yang telah dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten Soppeng

Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana yang dilakukan dalam penelitian ini diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) yang variasi dalam kemandirian keuangan daerah dapat dijelaskan oleh PAD. Ini merupakan angka yang sangat tinggi dan menunjukkan hubungan yang kuat dan signifikan antara PAD dan kemandirian keuangan. Meskipun secara statistic PAD berpengaruh secara signifikan, namun tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Soppeng masih tergolong sangat rendah, pada tahun 2024 tingkat kemandirian hanya mencapai 18,5% tertinggi selama periode pengamatan, namun tetap dalam kategori instruktif. Artinya pemerintah pusat masih dominan dalam pengambilan keputusan fiskal melalui dana transfer.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten Soppeng. Namun, meskipun ada pengaruh positif, tingkat kemandirian keuangan daerah masih sangat rendah, yaitu dalam rentang 15,3%- 18,5% selama tahun 2020- 2024. Artinya, Kabupaten Soppeng belum mampu mandiri secara fiskal dan masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat.

Penemuan ini didukung oleh berbagai penelitian sebelumnya yang menunjukkan korelasi positif antara PAD dan kemandirian keuangan daerah antara lain:

1. Fatimah et al. (2020): PAD berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah pada level structural nasional.

2. Syafira Frijunita et al. (2024): PAD berkontribusi positif terhadap peningkatan kemandirian fiskal pemerintah daerah meskipun tax effort dan belanja modal tidak selalu relevan.
3. Bukit (2022): PAD secara signifikan meningkatkan kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jambi, sementara Dana Alokasi Umum (DAU) menurunkan tingkat kemandirian fiskal.
4. Novianti & Ishak (2022): Di Kota Bandung, pajak daerah sebagai bagian PAD secara signifikan meningkatkan kemandirian keuangan pemerintah.
5. Malau & Simarmata (2020): PAD berpengaruh positif, sedangkan belanja modal berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Adapun kesamaan temuan: apa, dimana, kenapa dan bagaimana

- Apa: semua penelitian menemukan bahwa PAD merupakan variabel penting yang secara signifikan berkontribusi terhadap tingkat kemandirian fiskal suatu daerah.
- Dimana: penelitian dilakukan di berbagai daerah, seperti Jawa Barat, Jambi, Bandung, Halmahera Tengah, hingga Sidoarjo, yang menunjukkan kesamaan pola pengaruh PAD terhadap kemandirian fiskal meskipun dalam kondisi daerah yang berbeda.
- Kenapa: karena PAD berasal dari potensi lokal seperti pajak dan retribusi, maka daerah yang berhasil mengoptimalkan sumber daya lokal cenderung mampu mendanai kebutuhan belanja secara mandiri tanpa ketergantungan besar pada pemerintah pusat.

- Bagaimana: kenaikan PAD memungkinkan peningkatan belanja modal pembiayaan program daerah secara mandiri. Di Kabupaten Soppeng, meskipun PAD meningkat (terutama lonjakan signifikan pada 2024), namun rasio terhadap dana transfer pusat masih sangat kecil, sehingga kemandirian tetap rendah. Artinya, penguatan PAD perlu disertai reformasi struktural dalam pengelolaan fiskal dan potensi lokal.

Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan yang paling utama dari suatu daerah. Sedangkan sumber utama dari pendapatan asli daerah biasanya diperoleh dari pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan pendapatan asli daerah yang tinggi pemerintah daerah dapat menjalankan otonomi daerahnya sendiri dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan asli daerah menggambarkan sejauh mana dalam suatu daerah mampu membiayai kebutuhannya sendiri terutama pada sektor pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur tanpa mengandalkan bantuan dana dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah harus menggali potensi-potensi sumber penerimaan terutama pajak daerah dan retribusi daerah agar memberikan kekuatan anggaran untuk pemerintah daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Fatimah et al., 2020), (Kristina et al., 2021), (Syafira Frijunita et al., 2024), (Komunitas et al., 2012), (Wasil et al., 2020), (Bukit, 2022), (Novianti & Ishak, 2022), (Andriani & Wahid, 2019), (Saleh, 2020), dan (Malau &

Simarmata, 2020) yang menyatakan bahwa setiap kenaikan PAD akan diikuti dengan peningkatan kemandirian keuangan daerah.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten Soppeng. Hasil analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh kuat terhadap kemandirian fiskal dengan nilai koefisien determinasi (R^2), serta nilai signifikansi yang berarti hubungan antara PAD dan kemandirian keuangan sangat signifikan secara statistik.
2. Tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Soppeng masih tergolong sangat rendah. Selama periode 2020- 2024 rasio kemandirian keuangan daerah berada dalam kategori instruktif, dengan capaian tertinggi pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Soppeng masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat (DAU dan DAK).
3. Meskipun PAD menunjukkan tren peningkatan, kontribusinya terhadap pembiayaan mandiri daerah masih terbatas. Rendahnya rasio kemandirian mendanai pembangunan dan operasional pemerintahan daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya optimalisasi pendapatan daerah, baik melalui pajak, retribusi maupun pengelolaan aset daerah.
4. Kebijakan peningkatan PAD sangat penting untuk memperkuat otonomi fiskal daerah. Pemerintah daerah perlu menerapkan strategi yang lebih efektif

dalam pengelolaan PAD, seperti digitalisasi sistem perpajakan, peningkatan kinerja BUMD, serta penguatan aparatur pengelola keuangan daerah guna mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pusat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Soppeng, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah kabupaten soppeng perlu meningkatkan Upaya dalam menggali potensi PAD secara optimal. Hal ini dapat dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, penyempurnaan regulasi daerah, serta inovasi pelayanan publik berbasis digital agar proses pemungutan pajak dan retribusi lebih efisien dan transparan.
2. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur pengelola keuangan daerah sangat penting. Pemerintah perlu melakukan pelatihan berkelanjutan bagi pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) guna memperkuat sistem administrasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan PAD.
3. Optimalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan aset daerah sebagai sumber PAD alternatif. Pemerintah daerah harus mampu mendorong BUMD untuk lebih produktif dan menguntungkan, serta mengelola aset daerah secara efisien agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap keuangan daerah.

4. Mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Perlu ada perencanaan anggaran yang lebih mandiri dan berorientasi pada pemberdayaan potensi lokal untuk memperkuat struktur fiskal dan mencapai otonomi daerah yang sesungguhnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Aeniyatul. (2019). Bab iii metoda penelitian. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3, 1–9.
- Andriani, R. N. R., & Wahid, N. N. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 – 2015). *Jurnal Akuntansi*, 13(1), 30–39. <https://doi.org/10.37058/jak.v13i1.708>
- Asteria, B. (2015). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen*, 2(1), 51–61. <https://doi.org/10.32477/jrm.v2i1.162>
- Beno, J., Silen, A. ., & Yanti, M. (2022). Literature Review Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Braz Dent J.*, 33(1), 1–12.
- Bukit, P. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2019. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(1), 325. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.2036>
- Fatimah, N. N., Nopiyanti, A., & Mintoyuwono, D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah. *Equity*, 22(2), 197–214. <https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.936>

Hidaya, M. F., & Hasbiullah. (2023). Analisis Efisiensi Keuangan Daerah Dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Selatan. *Journal of Regional Economics*, 4(2), 56–69.

Komunitas, E., Persepsi, D. a N., Sikap, T., Dan, M., & Menonton, T. M. (2012). Fakultas ekonomika dan bisnis universitas diponegoro semarang 2012. *Semarang , Universitas Diponogoro*, 2015.

Kristina, S. R., Naukoko, A. T., Dj, H. F. S., Siti, O. :, Kristina, R., Naukoko, A. T., Dj Siwu, H. F., Ilmu, J., Pembangunan, E., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2021). the Effect of Local Revenue (Pad) and Balancing Funds on the Regional Financial Independence of Central Halmahera District. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 453–461.

Malau, E. I., & Simarmata, E. P. S. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EK&BI)*, 3(2), 332–337. <https://doi.org/10.37600/ekbi.v3i2.196>

Marlin, E., & Pratiwi, W. (2021). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bungo. *Jurnal Administrasi Sosial Dan Humaniora*, 4(3), 122. <https://doi.org/10.56957/jsr.v4i3.186>

Novianti, D., & Ishak, J. F. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bandung. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(3), 244–250. <https://doi.org/10.35313/iarj.v2i3.4127>

Saleh, R. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 15(2), 111–134. <https://doi.org/10.25105/jipak.v15i2.6226>

Syafira Frijunita, Gurendrawati, E., & Utaminingtyas, T. H. (2024). Pengaruh PAD, Tax Effort, dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 5(2), 256–269. <https://doi.org/10.21009/japa.0502.02>

Wasil, M., Putri, N. S., Larasati, A., & Mufida, N. (2020). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Sidoarjo. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 1(2), 99–109. <https://doi.org/10.26905/jrei.v1i2.5441>

Wibowo, A. W., & Utami, S. (2014). Dampak Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Investasi Di Kabupaten Sleman. *Paradigma: Jurnal Ilmu Administrasi*, 3(1), 22–43.



Lampiran 1**Surat Permohonan Izin dari Fakultas**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS



Nomor : 435/05/A.2-II/III/46/2025 Makassar, 17 Maret 2025

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar

Di-

Tempat

Dengan Hormat

Dalam rangka proses penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : WAODE NUR KHALIFA MUQADDIMA

Stambuk : 105731108021

Jurusan : Akuntansi

Judul Penelitian : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng (Studi Kasus Di BPKPD Soppeng)

Dimohon kiranya mahasiswa tersebut dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai tempat mahasiswa tersebut melakukan penelitian

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuanya diucapkan terimakasih.

Dekan.



Tembusan:

1. Rektor Unismuh Makassar
2. Arsip

Surat Permohonan Izin dari LP3M



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 6558/05/C.4-VIII/III/1446/2025

18 March 2025 M

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

18 Ramadhan 1446

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 435/05/A-2-II/III/46/2025 tanggal 17 Maret 2025, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : WAODE NUR KHALIFA MUQADDIMA

No. Stambuk : 10573 1108021

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG (STUDI KASUS DI BPKPD SOPPENG)"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 20 Maret 2025 s/d 20 Mei 2025.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

B. N. M. Anief Muhsin, M.Pd.
NBM 1127761

Surat Izin dari PTSP Provinsi Sul-Sel



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor : 6606/S.01/PTSP/2025 Kepada Yth.
 Lampiran : - Bupati Soppeng
 Perihal : Izin penelitian

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 6558/05/C.4-VIII/III/1446/2025 tanggal 18 Maret 2025 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **WAODE NUR KHALIFA MUQADDIMA**
 Nomor Pokok : 105731108021
 Program Studi : Akuntansi
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
 Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 259, Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG (STUDI KASUS DI BPKPD SOPPENG) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **24 Maret s/d 24 Mei 2025**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada Tanggal 24 Maret 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

Surat Izin dari PTSP Kabupaten Soppeng



SRN CO0005698

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Salotungo No. 2 Tlp. 0484 - 23743 Watansoppeng 90812

IZIN PENELITIAN

Nomor : 83/IP/DPMTNT/IV/2025

DASAR

1. Surat Permohonan **WAODE NUR KHALIFA M.** Tanggal **09-04-2025**

2. Rekomendasi dari **KESBANGPOL**

Nomor **77/IP/REK-T.TEKNIS/KESBANGPOL/IV/2025** Tanggal **09-04-2025**

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : **WAODE NUR KHALIFA M.**

UNIVERSITAS/ : **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA

Jurusan : **AKUNTANSI**

ALAMAT : **JL. SAMUDRA ASPOL, KEL. BOTTO KEC. LALABATA**

UNTUK : melaksanakan Penelitian :

JUDUL PENELITIAN :

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG (STUDI KASUS DI BPKPD SOPPENG)

LOKASI PENELITIAN :

BPKPD

JENIS PENELITIAN :

KUANTITATIF

LAMA PENELITIAN :

24 Maret 2025 s.d 24 Mei 2025

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung dan dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Ditetapkan di : Watansoppeng

Pada Tanggal : **09 April 2025**

An. BUPATI SOPPENG

KEPALA DINAS



ANDI DHAMRAH, S.Sos, M.M

Pangkat : **PEMBINA UTAMA MUDA**

NIP : **19700815 199803 1 007**

Biaya : Rp. 0,00

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada **QR Code**






UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PUSAT VALIDASI DATA

Jl. Sultan Alauddin 259 Makassar, Gedung Iqra It. 8 | e-mail: pvd.feb@unismuh.ac.id

LEMBAR KONTROL VALIDASI
PENELITIAN KUANTITATIF

NAMA MAHASISWA	WAODE NUR KHALIFA MUQADDIMA			
NIM	105731108021			
PROGRAM STUDI	AKUNTANSI			
JUDUL SKRIPSI	PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG (STUDI KASUS DI BPKPD SOPPENG)			
NAMA PEMBIMBING 1	Dr. Ansyarif Khalid, SE.,M.Si.,Ak.,CA			
NAMA PEMBIMBING 2	Dr.Mukminat RIdwan, SE.,M.Si			
NAMA VALIDATOR	ASRIANI HASAN,SE.,M.SC.			
No	Dokumen	Tanggal Revisi	Uraian Perbaikan/saran	Paraf*
1	Instrumen Pengumpulan data (data primer)	19/05/25	Menggunakan data sekunder	
2	Sumber data (data sekunder)	19/05/25	OK (menggunakan data laporan keuangan)	
3	Raw data/Tabulasi data (data primer)	19/05/25	OK (File yang dikumpulkan berupa data Excel)	
4	Hasil Statistik deskriptif	19/05/25	Tambahkan Hasil Statistik Deskriptif pada penelitian	
5	Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen	19/05/25	Penelitian ini tidak membutuhkan uji validitas dan uji reabilitas	
6	Hasil Uji Asumsi Statistik	19/05/25	- Revisi tabel uji autokorelasi, uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas (angka dituliskan lengkap dan tabel dituliskan kembali dan tidak copy paste dari SPSS) - Tambahkan hasil uji heteroskedastisitas selain menggunakan scatter plot (misalnya menggunakan uji park, dll)	
7	Hasil Analisis Data/Uji Hipotesis	19/05/25	- Revisi tabel hasil analisis regresi linier berganda, uji koefisien determinasi, uji t, uji F (angka dituliskan lengkap dan tabel dituliskan kembali dan tidak copy paste dari SPSS) - Pada judul harusnya menggunakan metode analisis regresi linier, namun pada bab3 tidak mencantumkan metode analisis yang digunakan.	
8	Hasil interpretasi data	19/05/25	Revisi hasil uji yang ada pada point (4),(6),(7)	
9	Dokumentasi	19/05/25	OK	

*Harap validator memberi paraf ketika koreksi telah disetujui

**Catatan : Hasil Validasi ini disetujui untuk mengikut seminar hasil. Namun catatan usulan perbaikan wajib direvisi sebelum Ujian Skripsi.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PUSAT VALIDASI DATA

Jl. Sultan Alauddin 259 Makassar, Gedung Iqra Lt. 8 | e-mail: pvd.feb@unismuh.ac.id

LEMBAR KONTROL VALIDASI

ABSTRAK

NAMA MAHASISWA	WAODE NUR KHALIFA MUQADDIMA			
NIM	105731108021			
PROGRAM STUDI	Akuntansi			
JUDUL SKRIPSI	PENGARUH PENDAPATAN ASU DAERAH TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN SOPPENG (STUDI KASUS DI BPKPD SOPPENG).			
NAMA PEMBIMBING 1	Dr. Ansyarif Khalid, S.E., M.M.			
NAMA PEMBIMBING 2	Dr. Mukminati Ridwan, S.E., M.Si.			
NAMA VALIDATOR	Aulia, S.IP., M.Si.M.			
No	Dokumen	Tanggal Revisi/Acc	Uraian Perbaikan/saran	Paraf*
1	Abstrak	23/7/2025	1. KACAU dan tidak sesuai buku pedoman! 2. Ikuti buku pedoman penulisan KTI FEB Unismuh Makassar yang terbaru 3. Konsultasikan dengan pembimbing 4. Masih banyak TYPO 5. Gunakan grammarly untuk memperbaiki grammar abstrak bahasa Inggris 6. Nama pembimbing dalam abstrak, tidak disingkat dan cukup menuliskan nama saja tanpa gelar akademik dan lainnya	

*Harap validator memberi paraf ketika koreksi telah disetujui

BAB I Waode Nur Khalifa M-105731108021

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.multiparadigma.lecture.ub.ac.id
Internet Source

2%

2

Irene Fransisca Ponamon. "PENGARUH
PENGAWASAN INTERNAL, PEMAHAMAN
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN, DAN
KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA
TERHADAP KUALITAS INFORMASI LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA
SKPD PEMERINTAH KOTA MANADO", GOING
CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2014
Publication

2%

3

ojs.unimal.ac.id
Internet Source

2%

4

digilib.uinsa.ac.id
Internet Source

2%

5

repository.uhn.ac.id
Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

BAB II Waode Nur Khalifa M 105731108021

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX



19%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

digilibadmm.unismuh.ac.id

Internet Source

15%

2

repository.stia-aan.ac.id

Internet Source

4%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



BAB III Waode Nur Khalifa M 105731108021

ORIGINALITY REPORT

10% SIMILARITY INDEX

10% INTERNET SOURCES

6% PUBLICATIONS

% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	2%
2	dspace.umkt.ac.id Internet Source	2%
3	erepository.uwks.ac.id Internet Source	2%
4	jcs.greenpublisher.id Internet Source	2%
5	repo.uinsatu.ac.id Internet Source	2%
6	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes ☐ On

Exclude bibliography ☐ On

Exclude matches ☐ < 2%

BAB IV Waode Nur Khalifa M. 105731108021

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

jurnal.politeknikbosowa.ac.id
Internet Source

4%

2

jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id
Internet Source

2%

3

repository.uinsu.ac.id
Internet Source

2%

4

repo.iainbatusangkar.ac.id
Internet Source

2%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On

BAB V Waode Nur Khalifa M-105731108021

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

5%

★ www.scribd.com

Internet Source

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Waode Nur Khalifa M

Nim : 105731108021

Program Studi : Akuntansi

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10%	10 %
2	Bab 2	19%	25 %
3	Bab 3	10%	10 %
4	Bab 4	9%	10 %
5	Bab 5	5%	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 25 Juli 2025

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


Nursyah Safum M.I.P.
NBM: 964 591

Lampiran 2

Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
2020	19,481,179,569.70	6,264,366,345.50	18,396,001,683.00	107,718,593,739.67
2021	20,152,575,109.00	10,462,038,543.00	19,163,344,683.00	105,677,267,010.90
2022	24,214,869,864.00	5,652,120,152.00	16,409,490,091.00	96,708,499,730.03
2023	24,938,335,103.00	4,535,268,039.00	16,172,783,625.00	120,691,322,892.39
2024	26,811,741,860.00	4,410,246,820.54	16,458,176,699.00	130,478,349,636.26

Kemandirian Keuangan Daerah

Tahun	PAD	Tranfer pusat	Presentase
2020	151,860,141,337.87	854,758,766,531.00	17.8%
2021	155,455,225,345.90	970,643,355,351.00	16.0%
2022	142,984,979,837.03	931,660,464,598.00	15.3%
2023	166,337,709,659.39	924,615,682,393.00	18.0%
2024	178,158,515,015.80	962,398,539,540.00	18.5%

Data Triwulan

[illegible]

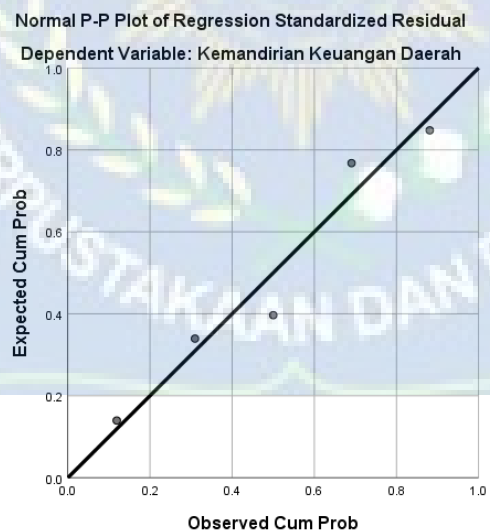
Tahun	PAD	Transfer Pusat	Persentase
2024	14846542918	80199878295	0.18511927
	14846542918	80199878295	0.18511927
	14846542918	80199878295	0.18511927
	14846542918	80199878295	0.18511927
	14846542918	80199878295	0.18511927
	14846542918	80199878295	0.18511927
	14846542918	80199878295	0.18511927
	14846542918	80199878295	0.18511927
	14846542918	80199878295	0.18511927
	14846542918	80199878295	0.18511927
	14846542918	80199878295	0.18511927
	14846542918	80199878295	0.18511927
	14846542918	80199878295	0.18511927
	14846542918	80199878295	0.18511927



Lampiran 3

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.00000
	Std. Deviation	.14981
Most Extreme Differences	Absolute	.219
	Positive	.219
	Negative	-.201
Test Statistic		.219
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		



Uji Koefisien Determinasi

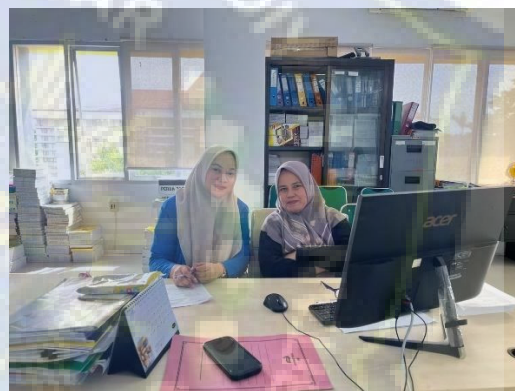
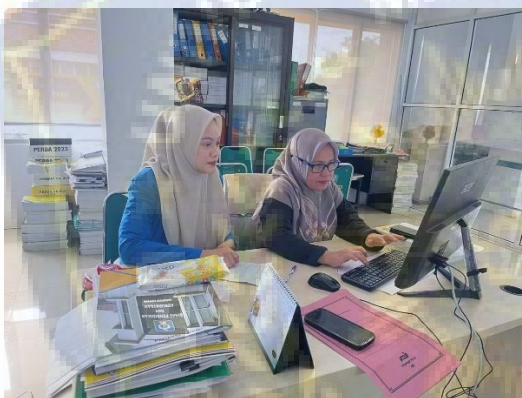
Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.987 ^a	.974	.974	.06927
a. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah				
b. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan Daerah				

Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.638	.117		5.452	.000
	Pendapatan Asli Daerah	.000	.000	.987	46.843	.000
a. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan Daerah						

Lampiran 4

Dokumentasi Penelitian



BIOGRAFI PENULIS



WAODE NUR KHALIFA MUQADDIMA, nama panggilan Khalifa lahir di Kayangan Soppeng pada tanggal 26 Februari 2003 putri dari pasangan Bapak Laode Sabarrudin dan Ibu Sunarmi. Peneliti adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Makassar. Pendidikan yang telah di tempuh yaitu SDN 4 Kalenrunge lulus tahun 2015, SMP Negeri 1 Soppeng lulus pada tahun 2018, SMA Negeri 1 Soppeng lulus tahun 2021. Mulai tahun 2021 mengikuti program Studi S1 jurusan akuntansi di fakultas ekonomi dan bisnis di kampus Universitas Muhammadiyah Makassar. Sampai penulis skripsi ini masih terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis.